

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel/Buku

Demak, I. N., Manossoh, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), 548-557.

Jayanti, R. S., Soemitro, R. A., & Suprayitno, H. (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) Berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 04 (01), 46-57.

Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1), 1-8.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.*

Kementerian Keuangan. (2014). *Surat Edaran Nomor SE-36/MK.01/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.*

Kementerian Keuangan. (2016). *Surat Edaran Nomor SE-48/MK.01/2016 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.*